



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2026**

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kemudian pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kepala daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat. Kepala daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. Selanjutnya, masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun ringkasan LPPD untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

1. Capaian Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan indikasi yang semakin membaik. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$).

IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 mencapai angka 72,41 poin naik 0,69 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 71,72 poin. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Barat berada di posisi ke-6 se Provinsi Lampung dan masuk kedalam kategori tinggi. Sedangkan untuk capaian masa jabatan Periode ke-2 (dua) di tahun anggaran 2025, IPM Kabupaten Lampung Barat kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 73.14 Poin atau naik sebesar 0,73 Poin.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia

INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia	Point	71,72 (↑)	72,41 (↑)	73,14 (↑)

Sumber Data : BPS 2026

IPM merupakan ukuran kualitas hidup yang dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar tersebut. IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Adapun Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain :

Komponen-komponen pembentuk IPM adalah:

- **Umur panjang dan hidup sehat:** Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir
- **Pengetahuan:** Diukur dengan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah
- **Standar hidup layak:** Diukur dengan produk nasional bruto per kapita

Capaian Komponen IPM

Komposit dalam perhitungan IPM terdiri dari 4 (empat) Indikator antara lain:

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**
2024 : 73,96 Tahun (↑) sebesar 0,18 dari tahun sebelumnya.
2025 : 74,24 Tahun (↑) sebesar 0,28 dari tahun sebelumnya.
- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**
2024 : 12,30 Tahun (↑) sebesar 0,04 dari tahun sebelumnya.
2025 : 12,31 Tahun (↑) sebesar 0,01dari tahun sebelumnya.
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**
2024 : 8,56 Tahun (↑) sebesar 0,2 dari tahun sebelumnya.
2025 : 8,57 Tahun (↑) sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya.

• **Pengeluaran Perkapita**

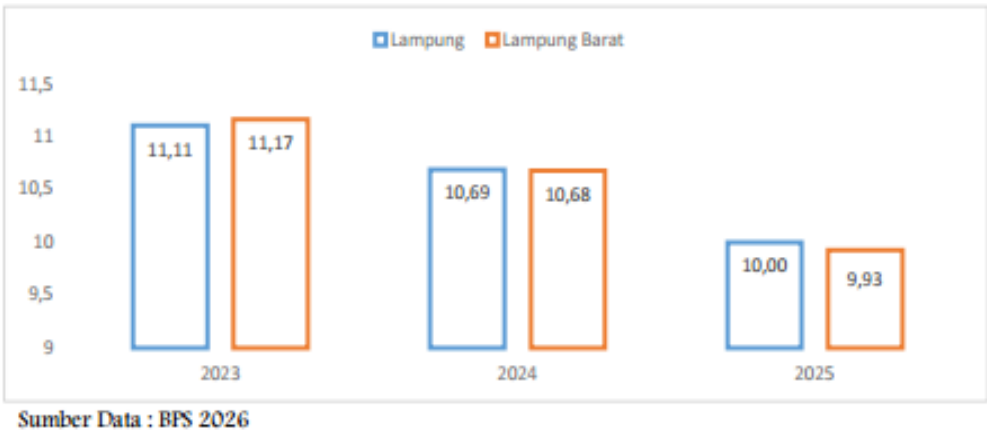
2024 : Rp 10.965.000 (↑) sebesar Rp.372.000 dari tahun sebelumnya.

2025 : Rp Rp 11.612.000 (↑) sebesar Rp.647.000 dari tahun sebelumnya.

b. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari Daerah adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2025 capaian kinerja kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan hasil yang positif. Tingkat kemiskinan sebesar 9,93% sedangkan untuk jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 31.230 ribu Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan dimana pada tahun 2024 sebesar 10,68% setara dengan 33.430 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebanyak 0,75%.

Grafik 1.1
Persentase Angka Kemiskinan, Provinsi Lampung
dan Kabupaten Lampung Barat 2023-2025



Jika dilihat dari Grafik di atas, angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023, 2024 dan 2025 dibawah dari angka kemiskinan provinsi Lampung.

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dapat dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan 100. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Hal ini dapat menjadi masalah dalam perekonomian, karena dapat

menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Barat sebesar 2,09% atau sebesar 4.043 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Barat mengalami sedikit Kenaikan yang pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka kembali naik sebesar 2,11% atau sebesar 4.000 Jiwa, naik sebanyak 0,02%. Kenaikan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat dari grafik di bawah.

Grafik 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka



d. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2025, PDRB Per kapita Lampung Barat ADHB mencapai 33,77 juta rupiah bertambah 1,91 juta rupiah lebih dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 31,86 juta rupiah lebih. Namun, Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan perkapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian

nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB perkapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat

Tabel 1.2
PDRB PERKAPITA

INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025
PDRB Per Kapita	Juta (Rp)	28,86 (↑)	31,86 (↑)	33,77 (↑)

Sumber Data : BFS 2026

e. Gini Rasio/Ketimpangan Pendapatan

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di wilayah Lampung Barat. Nilai rasio gini berkisar anatar 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, rasio gini diupayakan mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan pendapatan antar penduduk. Pada tahun 2025, Gini Rasio Kabupaten Lampung Barat tercatat 0,260 Point lebih angka tersebut mengalami penurunan sedikit jika dibandingkan dengan Gini Rasio pada 2024 yang sebesar 0,290 Point. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 namun lebih baik dikarenakan ketimpangan lebih rendah.

Tabel 1.3
Gini Ratio

INDIKATOR	SATUAN	2023	2024	2025
RASIO GINI	Point	0,274	0,290	0,260

Sumber Data : BFS 2026

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya:

a. Urusan Pendidikan

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,17%	81,83%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,16%	100%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	78,19%	100%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	70,03%	3,05%
5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	52,16%

Sumber : Dinas Pendidikan Lampung Barat, 2026

Berdasarkan realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan yaitu sebesar Rp. 9.287.866.192,- dengan program Pengelolaan Pendidikan. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Kegiatan/Subkegiatan Urusan Pendidikan

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4.481.476.072	3.810.019.892	85,02 %
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.027.343.120	3.202.876.464	79,53 %
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	779.047.000	774.050.548	99,36 %
	Jumlah	9.287.866.192	7.786.946.904	83,84 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

b. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,06	-
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	-
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,49%	77,64%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,90%	78,39%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,23%	80,53%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,15%	67,80%

7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,23%	76,33%
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98,39%	91,19%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92,14%	90,26%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9,58%	78,88%
11.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,19%	100%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,67%	12,03%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	74,45%	100%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	88,67%	69,62%
15.	Persentase kematian ibu	-	0,02%
16.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	-	1,12%

Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Barat, 2026

Berdasarkan realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan yaitu sebesar Rp. 4.107.311.000,- dengan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Kegiatan/Subkegiatan Urusan Kesehatan

No.	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	2.692.868.000	2.685.939.000	99,74 %
2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	32.150.000	32.100.000	99,84 %
3.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	0	0	0%
4.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	22.310.000	22.110.000	99,10 %
5.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	404.500.000	396.600.000	98,05 %
6.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	59.218.000	59.218.000	100,00 %
7.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	142.545.000	137.364.245	96,37 %
8.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	7.200.000	7.200.000	100,00 %
9.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita DM	6.035.000	5.508.300	91,27 %
10.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	333.060.000	332.651.350	99,88 %
11.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	325.695.000	317.220.541	97,40 %
12.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	81.730.000	77.550.000	94,89 %
	Jumlah	4.107.311.000	4.073.461.436	99,18 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Kesulitan dalam pembuatan Rencana aksi dikarenakan sulitnya menentukan sasaran penduduk dalam 5 tahun pemegang program di 12 indikator, kalau memakai data KMK, dinas kesehatan kesulitan dalam *breakdown* per desa karena di KMK atau BPS data penduduk hanya global, dan data sasaran memang terperinci akan tetapi tidak sampai per kecamatan sedangkan dengan data jumlah penduduk dari disdukcapil hanya tiap tahun;
- 2) Kesulitan meminta data dari Puskesmas dan baru mengirimkan data diwaktu mendekati akan tutup pelaporan. Selanjutnya ada juga Puskesmas yang belum selesai melaporkan hasil capaian kegiatannya ;
- 3) Belum adanya kesadaran setiap Puskesmas untuk melaporkan kinerja setiap bulannya;
- 4) Diharapkan ada pertemuan/zoom semua pemegang program untuk menambah wawasan dalam pegisian e-SPM Bangda untuk cara menghitung Kebutuhan Indikator Mutu apa lagi yang satuan Paket sedangkan dalam penghitungan berbeda.misal obat DM tidak satu jenis obat, dan untuk Alkes juga seperti itu.

c. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai	1,47%	0,1 %
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman	100%	100 %

3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,15%	-
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	88,47%	66,72 %
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100 %
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58,79%	53,82
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	100%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	-
10.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	-	0 %
11.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	-	100%
12.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	-	100%
13.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang	-	100%

Sumber : Dinas PUPR Lampung Barat, 2026

Berdasarkan realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar Rp. 10.104.170.600,- dengan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Kegiatan/Subkegiatan Urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.968.592.600	4.968.592.600	100 %
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.135.578.000	5.135.578.000	100 %
	Jumlah	10.104.170.600	10.104.170.600	100 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Mata Air berada di Kawasan Hutan Lindung; dan
- 2) Tidak diperbolehkan menggunakan sumur bor untuk proses pengambilan mata air

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupatenkota	0%	100%
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupatenkota	0%	-
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab kota yang ditangani	0,54%	100%
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,82%	-
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0%	100%

Sumber : Dinas PUPR Lampung Barat, 2026

Berdasarkan realisasi belanja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar Rp. 45,000,000,- dengan Program Pengembangan Perumahan. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Subkegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	45,000,000	0	0 %
	Jumlah	45,000,000	0	0 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah Tidak terdapat pencapaian Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dikarenakan tidak terjadinya bencana alam sekala besar.

- e. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	30%	20%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,74%	0,06%
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	75%	100%
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,7 menit	-
8.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	-	33%

Sumber : BPBD Lampung Barat dan Satuan Pol PP, Penyelamatan dan Damkar Lampung Barat, 2026

Berdasarkan realisasi belanja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 5.382.744.914,- dengan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum), Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan), Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar). Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Subkegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.566.423.400	1.565.188.865	99,92 %
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.525.173.744	1.492.743.850	97,87 %
3.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.291.147.770	2.268.256.191	99,00 %
	Jumlah	5.382.744.914	5.326.188.906	98,95 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll);
- 2) Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai serta mendirikan bangunan bertingkat pada wilayah jalur gempa yang terkadang tidak memenuhi standar konstruksi bangunan anti gempa;
- 3) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
- 4) Tingkat pendidikan aparatur dan masyarakat tentang bencana masih rendah;
- 5) Kurangnya Sumber Daya Manusia aparat Kebencanaan;
- 6) Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi;
- 7) Kurang/minimnya dukungan anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kebencanaan;
- 8) Belum memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

f. Urusan Sosial

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator	100%	-

2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	100%
3.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100%
4.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100%
5.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100%
6.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100%
7.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-	100%

Sumber : Dinas Sosial Lampung Barat, 2026

Berdasarkan realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 khususnya anggaran belanja untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial yaitu sebesar Rp. 1.095.360.410,- dengan Program Rehabilitasi Sosial dan lainnya. Selanjutnya informasi berkenaan serapan realisasi dan besaran anggaran berdasarkan kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Subkegiatan Urusan Sosial

No.	Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	253.842.000	253.338.856	99,80 %
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	164.325.000	160.525.850	97,69 %

3.	Pemberian Bantuan ATENSI oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang di salurkan oleh UPT Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor kepada penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar	599.485.900	599.485.900	100,00 %
4.	Penyediaan Sandang dari Dinas Sosial Provinsi Lampung	42.896.150	42.896.150	100,00 %
5.	Penanganan Khusus Kelompok Rentan Korban Bencana dari Dinas Sosial Provinsi Lampung	34.811.360	34.811.360	100,00 %
	Jumlah	1.509.051.500	1.507.664.445	99,91 %

Sumber: Data diolah dari <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 25 ayat (2) menyatakan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada PP 13 Tahun 2019 pasal 26 menyatakan EPPD terdiri atas evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi makro ini dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. Selanjutnya pada PP 13 Tahun 2019 pasal 29 menyatakan bahwa Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja. Penilaian capaian indikator kinerja didasarkan pada bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan. Bobot nilai tersebut ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil EPPD, Menteri menetapkan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:

- 1. peringkat kinerja provinsi;
- 2. peringkat kinerja kabupaten; dan
- 3. peringkat kinerja kota.

RLPPD tahun 2025 ini dilaporkan bersamaan dengan Pelaporan LPPD Tahun 2025 yang dilaporkan pada Tahun Anggaran 2026 ini. Hasil LPPD Tahun 2025 ini akan disampaikan capaian kinerjanya pada tahun 2026. Sedangkan untuk capaian kinerja LPPD Tahun 2024 yang dilaporkan Tahun Anggaran 2025, belum dipublikasi hasilnya karena masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. Rencana publikasi capaian kinerja tersebut disampaikan pada Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah pada Tanggal 25 April 2026 nanti. Perkembangan hasil EPPD Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2015-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Hasil EPPD Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2015-2024

Tahun EPPD	Dasar Hukum	Nilai	Status
2015	KEPMENDAGRI Nomor 800-35 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014	3,2169	Sangat Tinggi
2016	KEPMENDAGRI Nomor 120-10421 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015	3,2147	Sangat Tinggi
2017	KEPMENDAGRI Nomor 100-53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016	3,3435	Sangat Tinggi

2018	KEPMENDAGRI Nomor 118-8840 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017	3,0269	Sangat Tinggi
2019	Piagam dari Kemendagri	3,3059	Sangat Tinggi
2020	Rekap dari Inspektorat Provinsi Lampung	3,3173	Sangat Tinggi
2021	SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	2,15	Rendah
2022	SK Mendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	2,6028	Rendah
2023	SK Mendagri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025	2,9601	Sedang
2024	(Belum rilis)	-	-

Sumber: Data diolah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Barat, 2025

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Lampung telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.. Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat oleh BPK RI 10 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Tabel 2.17
Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah Lampung Barat Tahun 2015-2024

No.	Uraian	Predikat
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Opini BPK atas LKD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	Opini BPK atas LKD Tahun 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	Opini BPK atas LKD Tahun 2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya memperoleh predikat “Opini WTP dari BPK RI 10 Kali Berturut-turut Laporan Keuangan Tahun 2015 hingga 2024”. Hal ini didasari oleh Piagam Penghargaan Nomor: KEP-156/WPB.08/2024 Tanggal 29 November 2024 yang diberikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Berikut Piagam penghargaan dimaksud.



4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat (Unaudited) Tahun 2025, realisasi pendapatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mencapai Rp. 1.023.896.781.252,34,- atau sebesar 96,56% dari target anggaran sebesar Rp. 1.060.375.814.574,95,-. Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa realisasi belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mencapai Rp. 1.014.681.574.053,38,- atau sebesar 92,73% dari target anggaran sebesar Rp. 1.094.182.195.169,02,-. Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.18
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1.023.896.781.252,34	1.060.375.814.574,95	96,56	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.446.776.585,34	90.764.065.991,95	108,46	
	– Pajak Daerah	36.278.556.176,00	34.573.564.765,00	104,93	
	– Retribusi Daerah	46.546.312.712,00	43.612.133.398,01	106,73	
	– Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.296.507.077,37	3.296.507.077,37	100,00	
	– Lain-lain PAD yang Sah	12.325.400.619,97	9.281.860.751,57	132,79	
2.	PENDAPATAN TRANSFER	917.290.848.877,00	961.452.592.793,00	95,41	
	– Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	875.469.072.866,00	892.990.891.725,00	98,04	
	– Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.821.776.011,00	68.461.701.068,00	61,09	
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.159.155.790,00	8.159.155.790,00	100,00	
	– Pendapatan Hibah	4.037.720.000,00	4.037.720.000,00	100,00	
	– Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
	– Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.121.435.790,00	4.121.435.790,00	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.023.896.781.252,34	1.060.375.814.574,95	96,56	

No	Uraian	Realisasi	Anggaran	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B.	BELANJA DAERAH	1.014.681.574.053,38	1.094.182.195.169,02	92,73	
1.	BELANJA OPERASI	754.524.898.590,38	808.323.937.260,90	93,34	
	- Belanja Pegawai	478.604.145.964,69	512.647.592.349,00	93,36	
	- Belanja Barang dan Jasa	258.680.020.345,69	276.723.244.433,90	93,48	
	- Belanja Bunga	1.498.976.013,00	3.079.314.290,00	48,68	
	- Belanja Hibah	15.741.756.267,00	15.843.786.188,00	99,36	
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	30.000.000,00	0,00	
2.	BELANJA MODAL	103.063.289.803,00	107.576.260.292,00	95,80	
	- Belanja Modal Tanah	2.505.063.499,00	2.801.200.000,00	89,43	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.162.325.070,00	29.592.784.244,00	95,17	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.748.309.773,00	36.075.222.105,00	93,55	
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.414.923.716,00	32.870.568.663,00	98,61	
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.863.457.745,00	5.866.485.280,00	99,95	
	- Belanja Modal Aset Lainnya	369.210.000,00	370.000.000,00	99,79	
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.097.625.500,00	3.282.046.716,12	63,91	
	- Belanja Tidak Terduga	2.097.625.500,00	3.282.046.716,12	63,91	
4.	BELANJA TRANSFER	154.995.760.160,00	174.999.950.900,00	88,57	
	- Belanja Bagi Hasil	3.124.404.200,00	4.289.353.900,00	72,84	
	- Belanja Bantuan Keuangan	151.871.355.960,00	170.710.597.000,00	88,96	
	JUMLAH BELANJA	1.014.681.574.053,38	1.094.182.195.169,02	92,73	

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2025)

Link Google Drive : https://drive.google.com/file/d/1nFgCqY7M9pQn8BU0X_nDpLpWwAjOEeg/view?usp=drive_link

5. Inovasi Daerah

Pada dasarnya, inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik. Harapannya dengan adanya inovasi daerah kinerja pemerintah daerah berikut pelayanan publiknya dapat menunjukkan peningkatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usulan inovasi daerah tidak hanya untuk Pemerintah Daerah saja melainkan juga dibuka bagi masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan inovasi daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mampu menduduki peringkat 25 tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Secara Nasional, Kabupaten Lampung Barat mampu meraih indeks 12500 dengan predikat “Sangat Inovatif”. Hasil penilaian secara nasional tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019. Berikut ini daftar inovasi daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025:

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	GS-PUNDALAKI (Google Spreadsheet Pengumpulan Data Laporan Kinerja) BKPSDM	ngumpulan data kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menggunakan aplikasi Google sheet sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung program perencanaan yang akuntabel.
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ibel Online (Pelayanan Online Via Whatsapp dalam Pembuatan Ijin Belajar)	Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan izin belajar secara online yaitu menggunakan aplikasi whatsapp (WA) yang diharapkan dapat memudahkan pegawai dalam mengajukan izin tugas belajar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMpengelolaan serta penyajian data dan informasi

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Padik Google (Pengelolaan Arsip Diklat Kepemimpinan Berbasis Elektronik dengan Memanfaatkan Layanan Google Drive)	Inovasi ini merupakan inovasi pengelolaan arsip data untuk diklat kepemimpinan menggunakan layanan <i>google drive</i> . melalui inovasi ini data atau dokumen arsip diklat kepemimpinan dapat tersusun secara rapi , efektif dan efisien.
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PUP-GF (Pelayanan Usulan Pensiun melalui Google Form)	Pemanfaatan Google Form sebagai media layanan digital untuk mengajukan berkas usulan pensiun PNS secara daring merupakan bentuk kebaruan dalam meningkatkan efisiensi, ketertiban administrasi, dan transparansi pelayanan kepegawaian. Inovasi ini memungkinkan pegawai mengisi data secara mandiri, terdokumentasi otomatis, dan mudah dipantau oleh petugas kepegawaian, sehingga mempercepat proses verifikasi, mengurangi kesalahan input, serta mencegah keterlambatan pengurusan pencairan dana pensiun di Taspen.
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SATRIA (SATYALANCANA KARYA SATYA TERINTEGRASI DAN RESPONSIF MELALUI SURAT ELEKTRONIK)	Inovasi Satria merupakan Inovasi Pelayanan Publik berupa pengusulan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya secara online. melalui inovasi ini pengajuan tanda jasa bagi pegawai dilaksanakan secara online. Melalui inovasi ini proses pengusulan Satyalancana dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan pegawai untuk memantau status pengajuan mereka.
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	E-KAPAK (ELEKTRONIK KENAIKAN PANGKAT ASN KILAT)	Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan publik berupa pengajuan kenaikan pangkat ASN secara online dan transparan. Inovasi ini memudahkan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pengajuan pangkat secara efektif dan efisien. melalui inovasi ini pengajuan pangkat ASN di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lampung Barat dapat berjalan secara transparan serta mengurangi waktu serta biaya.
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIPEDULI (SISTEM PENDAFTARAN UJIAN DINAS LEWAT E-MAIL)	Inovasi ini merupakan Inovasi yang dibuat dan diimplementasikan dalam upaya untuk memudahkan peserta ujian dinas baik dari Kabupaten Lampung Barat maupun Kabupaten/Kota lainnya untuk melakukan pendaftaran ujian dinas secara online sehingga mengurangi waktu dan biaya. Inovasi ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pendaftaran ujian dinas serta mengurangi kesalahan dan kehilangan dokumen.
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SiORMAS (Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat)	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	siITIK (DISKUSI POLITIK)	
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Kabupaten Lampung Barat	
11	Dinas Kominfo	PODCAST " LAMBAR BICARA "	
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KARINDA (Kendaraan Dinas Lampung Barat Terdata) Pencegahan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintan Kabupaten Lampung Barat	
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM ASET (Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap) sebagai Digitalisasi Aset Tetap Daerah	
14		SIGER KOMBAL (Sistem Informasi Gelar Rekonsiliasi Belanja Modal) -	

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Platform Digital untuk Rekonsiliasi Belanja Modal Terintegrasi antara Pengurus Barang OPD dan Bidang BMD	
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIDAP MILIK DAERAH (Sistem Terintegrasi Arsip Digital Bukti Kepemilikan Aset & Aset Digital Pemerintah Daerah)	
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	E-LBMD (Laporan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik)	
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIPANDU BMD (Sistem Pemindaian Aset Daerah Digital Unggul Berbasis QR Code untuk Barang Milik Daerah)	
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIS-TARIF (Sistem Informasi Standar Harga Terintegrasi dan Real-time) untuk Pengajuan Usulan SSH OPD	
19	Badan Riset dan Inovasi Daerah	PM INDAH(PAMONG MEMBANGUN INOVASI DAERAH)	
20	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Pengembangan Geopark Kaldera Suoh Lampung Barat	
21	Badan Riset dan Inovasi Daerah	SURVEY IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur)	
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Launcing Buku Dari Liwa Ke Suoh	
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Penyusunan Buku Seri Kaldera Nusantara "Dari Liwa Ke Suoh" Kabupaten Lampung Barat	
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	BISTIK HARI RAYA (Bincang statistik menuju riset terpercaya)	
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	FOCUS GROUP DISCUSSION PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN	
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Papan Informasi Geopark Kaldera Suoh	
27	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat	Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan (SiAP) Online	
28	Bagian Hukum	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	HARI SANTRI NASIONAL TAHUN 2024	
30	Bagian Kesejahteraan Rakyat	GURU NGAJI	
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	UMROH	
32	Bagian Organisasi	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Klinik Pengadaan	

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
34	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PBJ BUNGA (Berdaya Saing, Unggul dan Akuntabel)	
35	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PBJ KREDIBEL (Kreatif, Disiplin dan Akuntabel)	
36	Bagian Tata Pemerintahan	RAKORDA (RAPAT KOORDINASI DAERAH) LAMPUNG BARAT	
37	BAPENDA	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	
38	BAPPEDA	CSR LAMPUNG BARAT	Inovasi ini membantu mengidentifikasi kebutuhan yang akan diintervensi oleh dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (dana CSR) untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan sasaran dan indikator yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lampung Barat
39	BAPPEDA	SAKTI BERKIBAR (Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi Berbasis Elektronik)	Inovasi ini bertujuan agar terjadi integrasi antara aplikasi perencanaan Pengendalian dan Evaluasi yang tertuang ke dalam pelaporan
40	BAPPEDA	SI GOKIL (Sistem Informasi Geospasial Kewilayahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup)	Inovasi ini menyediakan basis data spasial dan non-spasial yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan pembangunan kewilayahan, infrastruktur, dan lingkungan hidup
41	BAPPEDA	MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)	Inovasi ini mendorong terbangunnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
42	BPBD	PUSDALOPS-PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana)	inovasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) merupakan pelayanan terhadap bencana 24 jam untuk mengolah data, komunikasi, dan kordinasi informasi kebencanaan sebelum, saat dan sesudah bencana.
43	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	PAPER PROV (Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi)	
44	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	Parade Budaya Nusantara	
45	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	PEMUDA PELOPOR LAMPUNG BARAT	
46	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	Peningkatan SDM Kepariwisataan Melalui Pendampingan Pekon Wisata	
47	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	(Jum'at Hari Berolahraga)	
48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PELAKU HEBAT DAN CEPAT	
49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BIAS (Berbagi Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Media Sosial)	
50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PITULAS KTP-EL KU KHATONG	
51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KACAR-KUCUR (Perkawinan Lancar Dokumen Meluncur)	
52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	KIA KESLAH (kartu Identitas Anak Ke Sekolah- Sekolah)	
53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelanduk (Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling)	

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIMADU (Sistem Informasi Data Pemanfaatan Terpadu)	
55	BAPENDA	Penyuluhan Pemuktahiran Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Bagi Aparat Pekon	
56	BAPENDA	SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK MASYARAKAT (SiAP PM)	
57	BAPENDA	Pendampingan Pelayan dan Konsultasi Pajak Daerah	
58	Dinas Kesehatan	Promosi Kesehatan Vaksinasi Polio Gratis Di Posyandu	
59	Dinas Kesehatan	JAMBORE KADER POSYANDU	
60	Dinas Kesehatan	PROMOSI KESEHATAN PENTINGNYA CUCI TANGAN PAKAI SABUN	
61	Dinas Kesehatan	Manajemen dan Operasional JKN HEBAT	
62	Dinas Kesehatan	Gerakan Nasional Aksi Bergizi Siswa Siswi Lampung Barat	
63	Dinas Kesehatan	Aksi Gizi Bersama Puskesmas Liwa Di SMPN 2 Liwa	
64	Dinas Kesehatan	Aksi Gizi Bersama Puskesmas Liwa Di SMP Sekuting Terpadu	
65	Dinas Kesehatan	Aksi Gizi Bersama Puskesmas Kenali Di SMPN 1 Belalau	
66	Dinas Kesehatan	Aksi Gizi Bersama Puskesmas Batu Brak Di SMPN 1 Batu Brak	
67	Dinas Ketahanan Pangan	WASPADA (Pengawasan Keamanan Pangan Daerah)	Inovasi ini mendorong agar segala kegiatan pengawasan keamanan pangan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan serta pelaporan dilakukan secara tertib, sehingga diharapkan kemandirian pangan di Kab. Lampung Barat dapat meningkat
68	Dinas Ketahanan Pangan	Gema Lurah (Gerakan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Pangan Murah)	
69	Dinas Ketahanan Pangan	B2SA GOES TO POSYANDU	Inovasi ini dibuat dalam rangka mencegah dan menanggulangi stunting yang ada di Kab. Lampung Barat. Pembinaan dan pelatihan mengenai B2SA dilakukan di Posyandu agar tepat sasaran sehingga angka stunting dapat menurun serta ketahanan pangan keluarga dapat meningkat
70	Dinas Ketahanan Pangan	SUPER LAMBAR (Penyusunan Peta Rawan Pangan Kabupaten Lampung Barat)	
71	Dinas Ketahanan Pangan	Mopalugom (Monitoring dan analisis stok pangan melalui google form)	
72	Dinas Ketahanan Pangan	PANGAN LOKAL BERJAYA	Inovasi ini dibuat agar penganeekaragaman konsumsi pangan dapat dilakukan oleh setiap rumah tangga dengan memanfaatkan perkarangan atau lahan yang tidak terpakai sehingga hasilnya dapat dikonsumsi oleh keluarga tersebut bahkan untuk orang sekitarnya
73	Dinas Ketahanan Pangan	Simluprog (sistem informasi monitoring melalui prognosa)	

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
74	Dinas Ketahanan Pangan	PENUMPANG (Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan)	
75	Dinas Ketahanan Pangan	Pembelian stok beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	
76	Dinas Koperasi dan Perdagangan	Verval PPPKE	
77	Dinas Koperasi dan Perdagangan	Pusat Kuliner Liwa	
78	Dinas Koperasi dan Perdagangan	Pengembangan Informasi Barang Kebutuhan Pokok Melalui Digital Berbasis Web	
79	Dinas Koperasi dan Perdagangan	Program Ketersediaan Stok Barang	
80	Dinas Koperasi dan Perdagangan	MENTARI (Melayani Tera Satu Hari)	
81	Dinas Koperasi dan Perdagangan	DATA PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LAMPUNG BARAT	
82	Dinas Koperasi dan Perdagangan	BARET TF (Bayar Retribusi Ya Pake Transfer Saja)	
83	Dinas Lingkungan Hidup	PEDAL ONLINE	
84	Dinas Lingkungan Hidup	SAMBER (Sampah Membawa Berkah)	
85	Dinas Lingkungan Hidup	BERITA HEBAT (BERSIH INDAH TAMAN HEBAT)	
86	Dinas Lingkungan Hidup	ADA UPAH (AYO DAUR ULANG SAMPAH)	
87	Dinas Lingkungan Hidup	SATGAS KETAWA (Satuan Tugas Kebersihan Kota Liwa	
88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	BEGUAI JEJAMA (KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT)	Capaian Kegiatan Persentase kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif
89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pekon/Desa	Capaian Kegiatan Persentase Pekon Tertib Administrasi
90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pekon	Capaian Kegiatan Persentase Pekon Tertib Administrasi
91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	NUMERASI GASING	
92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tagar Budaya (Penetapan Cagar Budaya)	
93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata	
94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPPM (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata) PAUD	
95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraga Sekolah (Pembagian Seragam Gratis Siswa Sekolah)	
96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SI PAKIS HEBAT	
97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badik Balam (Beasiswa Pendidikan Strata Satu Bahasa Lampung)	
98	Dinas Perhubungan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
99	Dinas Perhubungan	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
100	Dinas Perhubungan	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	
101	Dinas Perhubungan	Sistem Lalu Lintas Terpadu (SILAT)	
102	Dinas Perhubungan	Sistem Marka Jalan dan Rambu Keselamatan (SIMARAK)	
103	Dinas Perikanan	TENGGIRI (Teknik Mengolah Beragam Ikan Terkini)	
104	Dinas Perikanan	PEMPEK SELAM (PEmbinaan Masyarakat PENGawas PerIKANan – SELamatkan Lingkungan, Aktif Mengawasi)	
105	Dinas Perikanan	Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dengan “SOSIS IKAN” (SOSialiaSi gemarIKAN)	
106	Dinas Perikanan	JABLOK (JARINGAN PEMBUDIDAYA & PEMBENIH IKAN LOKAL)	
107	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	TENAGA PENYULUH LAPANGAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (TPL-IKM)	Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha guna menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berada di Kabupaten Lampung Barat agar memiliki kelengkapan legalitas usaha (NIB, PIRT, HALAL, TKDN, BPOM), kemasan produk dan hal-hal penunjang lain yang memiliki sifat pengembangan pada sektor perindustrian.
108	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tim KEA	-
109	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Lestari Hayati	-
110	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Konservasi Hebat	Konservasi Hebat merupakan inovasi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang berfokus pada pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian berbasis konservasi lahan dan air. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur pendukung pertanian seperti teras sering, serta sarana konservasi lainnya lainnya guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi risiko kerusakan lahan dan dampak perubahan iklim. Inovasi ini menekankan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan pemberdayaan petani dalam pengelolaan prasarana pertanian secara berkelanjutan.
111	Dinas Perkebunan dan Peternakan	PESTA ANAK (Pemeriksaan <i>Post Mortem</i> pada Ternak)	PESTA ANAK (Pemeriksaan <i>Post Mortem</i> pada Ternak) merupakan inovasi dalam Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertujuan memastikan daging dan produk hewan yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Melalui kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dilakukan pemeriksaan <i>post mortem</i> pada ternak setelah pemotongan untuk mendeteksi penyakit, kelainan organ, serta potensi <i>zoonosis</i>. Pada sub kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, inovasi ini memperkuat kontrol di RPH dan titik distribusi guna melindungi masyarakat dari risiko penyakit serta menjamin mutu produk hewan yang dikonsumsi.

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
112	Dinas Perkebunan dan Peternakan		UBI RAMBAT (Unit Pembenihan Rakyat Lampung Barat Hebat) merupakan inovasi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang bertujuan memperkuat kemandirian benih unggul di tingkat daerah. Melalui kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota, inovasi ini mendorong pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal secara berkelanjutan. Pada sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, UBI RAMBAT difokuskan pada peningkatan mutu benih/bibit unggul, sertifikasi, serta penguatan kapasitas penangkar, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, menjaga kemurnian varietas lokal khususnya Kopi Robusta
113	Dinas Perikanan		PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK NELAYAN (BAGAN) bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembentukan, pembinaan dan pengembangan bagi kelompok nelayan / Kelompok Usaha Bersama (KUB). Selain hal tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk penumbuhkembangan kelompok nelayan, meningkatkan dan mengembangkan status kelompok nelayan, dan meningkatkan akses permodalan dengan memanfaatkan lembaga permodalan dan pengusaha perikanan yang ada
114	Dinas Perkebunan dan Peternakan		TERIKAT HALAL PETERNAKAN (Terbitnya Sertifikat Halal Pelaku Usaha Peternakan) merupakan inovasi dalam Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertujuan mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha peternakan dan produk hewan. Melalui kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dilakukan pembinaan, verifikasi, dan pendampingan pemenuhan standar hygiene, sanitasi, serta jaminan kehalalan proses produksi. Pada sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, inovasi ini memastikan produk yang beredar memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha peternakan.
115	Dinas Perkebunan dan Peternakan		TANAK NASI (Lalu Lintas Temak Terbina dan Sigap) merupakan inovasi pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertujuan memperkuat pengawasan lalu lintas temak dan produk hewan secara cepat, tertib, dan terintegrasi. Melalui kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan pengendalian administrasi dan teknis untuk memastikan temak yang dilalulintaskan memenuhi persyaratan kesehatan dan dokumen yang sah. Pada sub kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan (HPM) di Perbatasan, inovasi ini menekankan pemeriksaan fisik, validasi dokumen, serta deteksi dini penyakit hewan menular guna mencegah penyebaran penyakit antarwilayah dan melindungi kesehatan masyarakat serta keberlanjutan usaha peternakan
116	Dinas Perkebunan dan Peternakan	KOPI PAHIT (Kolaborasi Petani untuk Pengendalian Hama Tanaman Kopi Terpadu)	KOPI PAHIT (Kolaborasi Petani untuk Pengendalian Hama Tanaman Kopi Terpadu) merupakan inovasi pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang berfokus pada pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) kopi secara terpadu dan partisipatif.

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
117	Dinas Perkebunan dan Peternakan	PETI PAPAN KOPI (Pelatihan Terintegrasi Pasca Panen Kopi)	PETI PAPAN KOPI (Pelatihan Terintegrasi Pasca Panen Kopi) merupakan inovasi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang bertujuan meningkatkan kualitas dan nilai tambah kopi melalui penguatan kapasitas petani pada tahap pasca panen. Melalui kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dilakukan pembinaan agar sarana pasca panen seperti alat pengupas, pengering, dan penyimpanan digunakan sesuai standar teknis dan mutu. Pada sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, PETI PAPAN KOPI menekankan pelatihan terpadu mulai dari sortasi, fermentasi, pengeringan, hingga pengemasan, sehingga mutu green bean meningkat, kehilangan hasil berkurang, dan daya saing kopi daerah semakin kuat.
118	Dinas Perkebunan dan Peternakan	KEBAYA dan KOPI (Kelas Budidaya Kopi)	KEBAYA dan KOPI (Kelas Budidaya Kopi) merupakan inovasi pada Program Penyuluhan Pertanian yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dalam budidaya kopi berkelanjutan. Melalui kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, inovasi ini menghadirkan kelas tematik dan praktik lapang yang membahas teknik pembibitan, penanaman, pemupukan berimbang, pemangkasan, hingga pengendalian hama terpadu. Pada sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, KEBAYA dan KOPI mengoptimalkan demplot, alat peraga, dan media pembelajaran sebagai sarana edukasi, sehingga produktivitas dan kualitas kopi meningkat serta kesejahteraan petani semakin baik.
119	Dinas Perkebunan dan Peternakan	KERING KOPI (Kelas Roasting Kopi)	KERING KOPI (Kelas Roasting Kopi) merupakan inovasi pada Program Penyuluhan Pertanian yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan petani dalam pengolahan kopi tahap akhir (<i>roasting</i>) guna meningkatkan nilai tambah produk. Melalui kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, inovasi ini menghadirkan pelatihan teknis tentang teknik sangrai (<i>light, medium, dark roast</i>), pengendalian suhu dan waktu, profil rasa, hingga dasar quality control. Pada sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, KERING KOPI mengoptimalkan penggunaan mesin roasting, grinder, dan alat cupping sebagai media praktik langsung, sehingga pelaku usaha mampu menghasilkan kopi sangrai berkualitas, berdaya saing, dan memiliki identitas cita rasa khas daerah
120	Dinas Perkebunan dan Peternakan	BANTAL PETANI KOPI (Bantuan Terpal Petani Kopi)	BANTAL PETANI KOPI (Bantuan Terpal Petani Kopi) merupakan inovasi pada Program Penyuluhan Pertanian yang bertujuan meningkatkan mutu pasca panen kopi melalui dukungan sarana sederhana namun tepat guna. Melalui kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, inovasi ini disinergikan dengan edukasi praktik penjemuran kopi yang baik dan benar agar terhindar dari kontaminasi tanah, jamur, dan kotoran. Pada sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, bantuan terpal dimanfaatkan sebagai media pembelajaran langsung di lapangan, sehingga petani memahami standar pengeringan, menjaga kualitas green bean, serta meningkatkan nilai jual kopi secara berkelanjutan.

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
121	Dinas Perkebunan dan Peternakan	TERNAK SEHAT, STOK VAKSIN TERPENUHI	TERNAK SEHAT, STOK VAKSIN TERPENUHI merupakan inovasi pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertujuan menjamin ketersediaan vaksin serta pelayanan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan perencanaan kebutuhan vaksin, pengadaan, distribusi tepat sasaran, serta monitoring rantai dingin untuk menjaga mutu vaksin. Pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, inovasi ini memastikan pelaksanaan vaksinasi, pengobatan, dan tindakan preventif secara cepat dan responsif, sehingga mampu mencegah penyakit hewan menular, meningkatkan produktivitas ternak, serta melindungi kesehatan masyarakat.
122	Dinas Perkebunan dan Peternakan	PENING (Pengobatan Vaksin Keliling)	PENING (Pengobatan Vaksin Keliling) merupakan inovasi pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertujuan mendekatkan layanan pengobatan dan vaksinasi hewan secara langsung ke sentra-sentra peternakan. Melalui kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular, inovasi ini mendukung respons cepat terhadap potensi wabah melalui pelayanan keliling yang terjadwal dan berbasis pemetaan risiko. Pada sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan <i>Zoonosis</i> dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, PENING menitikberatkan pada vaksinasi massal, pengobatan kasus, edukasi biosekuriti, serta pelaporan aktif, sehingga mampu menekan penyebaran penyakit, melindungi ternak, dan menjaga kesehatan masyarakat.
123	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban merupakan kegiatan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertujuan menjamin hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dipotong sesuai ketentuan kesehatan hewan dan syariat. Melalui kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dilakukan pemeriksaan <i>ante mortem</i> (sebelum pemotongan) dan <i>post mortem</i> (setelah pemotongan) untuk memastikan hewan bebas dari penyakit menular serta daging aman dikonsumsi. Pada sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, pengawasan dilakukan di lokasi penjualan, tempat pemotongan, hingga distribusi daging kurban, sehingga prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) terpenuhi serta kesehatan masyarakat tetap terjaga
124	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	RATA TIFFIS (REALISASI ADMINISTRASI TERENCANA AKURAT, EFEKTIF DAN EFISIEN)	
125	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	SPERPAT PORANG (STRATEGI PENINGKATAN PERCEPATAN PELAPORAN KEUANGAN)	
126	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dia SRIKANDI (Di Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Dia SRIKANDI Di Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah Program Pemerintah untuk pengelolaan arsip dan surat-menyurat elektronik. Aplikasi ini bertujuan menciptakan birokrasi digital yang efisien, terintegrasi, dan paperless sesuai aturan SPBE. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			transformasi digital di seluruh lingkungan instansi pemerintah. Melalui Kegiatan Penerapan Aplikasi SRIKANDI ini dapat meningkatkan dan mengoptimalkan antar Perangkat Daerah dalam hal pengiriman baik surat masuk maupun surat keluar secara elektronik.
127	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	POJOK BACA DIGITAL (POCADI)	Pojok Baca Digital (PoCaDi) adalah fasilitas ruang baca hibrida (fisik & digital) di ruang publik untuk meningkatkan literasi. PoCaDi menyediakan akses gratis ke ribuan e- book melalui komputer, tablet, dan jaringan internet, sekaligus koleksi buku fisik.
128	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	BUDI SELANCAR (BUKU DIGITAL AKSES LITERASI LANCAR/E-BOOK)	Di era digital seperti sekarang ini tentu kita tidak bisa menampik bahwa perubahan buku pun juga mengikutinya. Kini tidak hanya mengenal buku sebagai buku cetak saja, melainkan juga ebook tidak dapat dipungkiri jika ebook sekarang mulai banyak ditemukan. Hal ini dikarenakan banyak alat smartphone yang mendukung bisa membaca ebook, ditambah kemampuan penyimpanan ponsel yang juga besar-besar. Sehingga semakin banyak ebook yang dapat disimpan di dalam ponsel dan bisa di baca sewaktu-waktu. Akhir-akhir ini memang ebook lebih banyak diminati karena tidak perlu membawa buku secara fisik. Cukup bermodal membawa satu smartphone saja, kita bisa membaca dimana saja dan kapan saja kita butuhkan. Jadi, jika era teknologi canggih seperti ini masih ada yang bingung mau ngapain, sebenarnya sedikit aneh. Karena banyak hal yang bisa dilakukan lewat kemajuan teknologi.
129	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Festival Budaya Sekala Bekhak ke-9	
130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	INOVASI BENSMART (BENTOR PERPUSTAKAAN KELILING UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT)	Tujuan bentor perpustakaan keliling merupakan wujud aksi Pemkab Lambar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi. Armada bentor ini dipilih agar pelayanan perpustakaan dapat dirasakan masyarakat diseluruh pelosok kecamatan. Karena kendaraan ini mampu menjelajah ke daerah-daerah yang mungkin mobil tidak bisa melewatinya.
131	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	PUSLING (PERPUSTAKAAN KELILING)	
132	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	BIMTEK PERPUSTAKAAN	
133	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	OPEN INLISLITE (OTOMASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DENGAN APLIKASI INLISLITE)	
134	Dinas PPKBPPPA	Kesrak TNI Manunggal KB Kesehatan	kegiatan kesrak manunggal TNI Kesehatan Adalah inovasi merupakan salah satu program lintas sektoral untuk meningkatkan capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan ,program Ini merupakan salah satu wujud kepedulian TNI bersama Dinas PP, KB, PP dan PA Lampung Barat serta instansi terkait lainnya
135	Dinas PPKBPPPA	KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) LAMPUNG BARAT	KLA Kabupaten Layak anak adalah sebuah inovasi untuk memastikan lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak, serta memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak serta demi terciptanya lingkungan aman, nyaman dan kondusif bagi bagi tumbuh kembang anak, dengan memastikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap mereka.
136	Dinas PPKBPPPA	DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA)	Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Adalah sebuah terobosan inovasi untuk membentuk suatu tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
137	DINAS PPKBPPPA	GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan)	GDPK ADALAH Inovasi Pencacatan Kependudukan Mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya serta tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi factor penting dalam mencapai kemajuan daerah.
138	Dinas PPKBPPPA	PEKKA PEREMPUAN KEPALA KELUARGA	INOVASI PEKKA merupakan inovasi yang bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan / kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan kualitas keluarga (Perempuan Kepala Keluarga) dalam peningkatan kualitas ketahanan Ekonomi
139	Dinas Sosial	VERVAL DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Inovasi VERTICAL DTKS (Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) merupakan upaya peningkatan kualitas dan akurasi data masyarakat miskin dan rentan miskin melalui proses verifikasi dan validasi secara berkala di tingkat daerah. Inovasi ini dilaksanakan dalam kerangka Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, khususnya pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dan subkegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
140	Dinas Sosial	GEMPITA PANGAN: Gerakan Empati Pangan Tanggap Bencana	inovasi GEMPITA PANGAN (Gerakan Empati Pangan Tanggap Bencana) merupakan inisiatif dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam memperkuat respon cepat pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam maupun bencana sosial. Inovasi ini dilaksanakan dalam kerangka Program Penanganan Bencana, khususnya pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota melalui subkegiatan penyediaan makanan.
141	Dinas Sosial	SI-KUBE FAKIN (Strategi Inklusif Penguatan Usaha Masyarakat Miskin)	Inovasi SI-KUBE FAKIN (Strategi Inklusif Penguatan Usaha Masyarakat Miskin) merupakan upaya dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan usaha produktif secara berkelompok. Inovasi ini dilaksanakan dalam kerangka Program Rehabilitasi Sosial, khususnya pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, melalui subkegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS.
142	Dinas Sosial	LAPIS JIWA (Lampung Barat Peduli Sehat Jiwa)	Inovasi LAPIS JIWA (Lampung Barat Peduli Sehat Jiwa) merupakan inisiatif dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan perhatian dan pelayanan sosial terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan kesehatan mental, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Inovasi ini dilaksanakan dalam kerangka Program Rehabilitasi Sosial, pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial, melalui subkegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
143	Dinas Sosial	Pendamping PKH Lampung Barat: Inovasi Humanis dalam Membangun Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat	Inovasi Pendamping PKH Lampung Barat: Inovasi Humanis dalam Membangun Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat merupakan upaya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan kualitas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat melalui pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Inovasi ini dilaksanakan dalam kerangka Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan fokus pada pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Pendamping berperan memberikan edukasi, motivasi, serta fasilitasi agar keluarga penerima manfaat dapat meningkatkan kesejahteraan dan secara bertahap mencapai kemandirian

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
144	Dinas Sosial	Pendamping BPNT Lampung Barat: Inovasi Kolaboratif Menuju Pangan Tepat Sasaran dan Keluarga Mandiri	Inovasi Pendamping BPNT Lampung Barat: Inovasi Kolaboratif Menuju Pangan Tepat Sasaran dan Keluarga Mandiri merupakan upaya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan efektivitas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan pangan tersalurkan secara tepat sasaran. Melalui pendampingan yang kolaboratif, pendamping membantu keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dalam memahami pemanfaatan bantuan, memberikan bimbingan sosial, serta mendorong peningkatan kemandirian keluarga. Inovasi ini mendukung kebijakan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan
145	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SL PPO (Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik)	
146	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	GIAT PENGEMBANGAN PUPO (Kegiatan Pengembangan Pupuk Organik)	
147	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SELA PAPA MANGAN (Sekolah Lapang Pasca Panen Tanaman Pangan)	
148	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SL IKLIM (Sekolah Lapang Iklim)	
149	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SL PSA (Sekolah Lapang Pengelolaan Sumber Air)	
150	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu)	
151	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SL AGRIBISNIS (Sekolah Lapang Agribisnis)	
152	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	KELOLA PASCA PANEN (Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan)	
153	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	LKMA Bertumbuh 2024 (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Bertumbuh 2024)	
154	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	BANTUAN HSP 2024 (Bantuan Hand Sprayer 2024)	
155	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	BINA PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS HORTI 2024 (Pembinaan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 2024)	
156	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	ALPUKAT LUMBOK BERJAYA 2024	
157	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	SL HAP Horti 2024 (Sekolah Lapang Hama dan Penyakit Tanaman Hortikultura 2024)	
158	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	GERDAL HAP TP 2024 (Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan 2024)	
159	Inspektorat	UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)	

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
160	Inspektorat	DONGENG SAI BETIK (SARANA INOVASI BERCERITA GRATIFIKASI)	
161	Inspektorat	TOGA BERANI	
162	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	SIJEMPOL (Sistem Jemput Bola Pelayanan Lowongan Kerja)	
163	POLPP	PESAN PM	
164	POLPP	PEDULI ODGJ	
165	POLPP	DAMKAR HEBAT	
166	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pemanfaatan Google Form Pada Registrasi Calon Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi : Pelatihan Menjahit dan Pelatihan Sablon Tahun Anggaran 2024	
167	POLPP	INBUKER (INFORMASI BURSA KERJA)	
168	PTSP	Survey Perizinan Online (SUPER ON)	
169	PTSP	PM SANTUN (PAJAK MANDIRI SISTEM APLIKASI NON TUNAI)	
170	PTSP	Survey Perizinan Online (SUPER ON)	
171	PTSP	SISTEM PERIZIAN DIGITAL (SI PERDI)	
172	PTSP	SI EVELINE	
173	PTSP	SISTEM INFORMASI PERENCANAAN ONLINE (SISPERON)	
174	PTSP	PENGUNAAN TAPING BOX DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK RUMAH MAKAN DAN HOTEL	
175	PUPR	PENERAPAN APLIKASI SISTIM INFORMASI MONITORING DAN ANALISIS SANITASI LAMPUNG BARAT (SIMANIS LAMBAR) SEBAGAI UPAYA MEMENUHI HAK DASAR BIDANG SANITASI	Inovasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi secara tidak langsung akan membawa sesuatu hal yang baru yang dapat memudahkan dalam menganalisa, memonitoring dan merencanakan program sanitasi pada kondisi yang lebih baik
176	PUPR	PORTAL DATA DIGITAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT	Inovasi ini dilakukan untuk mendukung visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui misi (1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pelayanan, (3)Menciptakan inovasi pelayanan.
177	PUPR	SISTEM PENGELOLAAN ARSIP DIGITAL (SIPAL) BERBASIS APLIKASI “TERABOX” GUNA OPTIMALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN DAERAH IRIGASI DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT	Inovasi terkait pengarsipan data berbasis digital dengan menggunakan aplikasi Sebagai Langkah Upaya optimalisasi pengelolaan dokumen pelaksanaan pekerjaan pada daerah irigasi

NO.	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
178	PUPR	PEMANFAATAN GOOGLE SITE DALAM INFORMASI TERKAIT PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT	Inovasi ini mendukung upaya digitalisasi layanan pemerintahan daerah, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik.
179	RSUD Alimudin Umar	Sistem Informasi Kepuasan Pelayanan (SIKEP) RSUD Alimuddin Umar	Inovasi digital berupa sistem survei kepuasan pasien berbasis online untuk mengukur mutu pelayanan secara cepat, transparan, dan berkelanjutan sebagai dasar perbaikan layanan rumah sakit
180	RSUD Alimudin Umar	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Alimuddin Umar	Inovasi integrasi pelayanan rumah sakit berbasis teknologi informasi yang menghubungkan pendaftaran, rekam medis, farmasi, laboratorium, dan keuangan guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan.
181	RSUD Alimudin Umar	Pengelolaan Limbah Medis Padat	Inovasi sistem pengelolaan limbah medis sesuai standar kesehatan dan lingkungan melalui pemilahan, pencatatan, serta kerja sama pemusnahan dengan pihak berizin untuk menjamin keamanan pasien, petugas, dan lingkungan.
182	Sekretariat DPRD	Dukungan dan Fasilitas Pembahasan APBD Kabupaten	
183	Bagian Hukum	Sistem Informasi Melalui Website JDIH	Inovasi digital berupa sistem informasi hukum yang dapat dijangkau menggunakan website, sehingga dapat mempermudah pengguna yang membutuhkan informasi atau data tersebut.

Sumber : BRIDA Lampung Barat, 2025